BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Minuman Beralkohol merupakan hasil kebudayaan yang telah ada sejak masa periode klasik sejarah manusia. Bir sebagai salah satu jenis minuman alkohol telah dikenal sejak zaman klasik. Dalam catatan sejarah, Mesir Kuno dan Mesopotamia merupakan bangsa yang telah mengenalkan minuman ini sejak satu Abad Sebelum Masehi. Minuman beralkohol adalah minuman yang sangat umum selain air mineral dan teh. Faktor yang mempengaruhi penerimaan konsumsi minuman beralkohol ini bervariasi dari berbagai masyarakat. Di antaranya adalah gaya hidup, demografi, batasan usia, serta kondisi alam dan sosial sekitarnya.¹

Pesatnya modernisasi yang melanda masyarakat Jawa ditandai dengan cepatnya pertumbuhan industri maupun perdagangan. Hal ini dapat dilihat pada pesatnya pembangunan infrastruktur kota seperti gedung-gedung perkantoran, pertokoan, pasar, jembatan, dan lain-lain. Sarana komunikasi dan transportasi seperti telepon, telegram, penerangan atau listrik, surat kabar, kereta api, jalan, kapal mesin uap, mobil dan lain sebagainya, serta semakin heterogennya pelapisan sosial masyarakat di perkotaan yang membentuk masyarakat konsumen.

Hal ini menuntut semakin besarnya pemenuhan kebutuhan hidup. Dalam sudut pandang perkembangan zaman, kondisi tersebut bagi masyarakat jajahan dapat diistilahkan sebagai kondisi menuju masyarakat modern. Berbagai cara

¹ Arif Jamaluddin Malik, "Sejarah Sosial Hukuman Peminum Khamr," Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam Vol 3, no. 1. 2013. hlm. 8

modernitas dikenalkan di tanah jajahan. Ini sebenarnya adalah bagaimana proses budaya orang-orang Barat dibawa ke tanah jajahan.

Pada periode awal kedatangan bangsa-bangsa Eropa, dampak budaya Barat masih sangat kecil. Baru setelah budaya “Barat” menjadi prestise dan dilihat sebagai derajat sosial yang tinggi, maka sistem dan pola budaya mereka mulai mempengaruhi masyarakat Indonesia. Sehingga bisa dilihat bahwa budaya kebarat-baratan kemudian berkembang sekedar pada nilai penampakan budaya luar yang kemudian dilihat sebagai gaya hidup, bukan sebagai semangat atau pandangan dan prinsip hidup.

Sudah banyak terjadi perubahan sosial dimana-mana. Moral individu dan bahkan masyarakat kita sudah sangat terdegradasi oleh zaman. Memang semua itu secara tidak langsung dapat dipengaruhi oleh perubahan politik, ekonomi, budaya, dan lain-lain. Semua itu membuat kita tidak sadar dalam lingkungan kita telah terjadi perubahan pranata sosial, dan perubahan nilai-nilai adat istiadat yang dapat mengancam kehidupan kita. Akibatnya ketidakharmonisan, ketidakseimbangan, ketidakmerataan yang merupakan faktor-faktor munculnya jenis-jenis penyimpangan yang mendekati pada tindak kejahatan pada masyarakat.² Keseluruhan dampak perubahan itu tentu sudah menyentuh aspek kehidupan manusia, dimana salah satu contoh yang paling banyak terjadi adalah penyalahgunaan terhadap penggunaan minuman keras beralkohol (miras) yang sering disebut sebagai alkoholisme.³

² Syarief, Amiroel Oemara, Merina Pratiwi, and Gellysa Urva. "Edukasi Dampak Minuman Keras di Kalangan Remaja." *Literasi Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Inovasi* Vol 2, no. 1 2022. hlm. 12

³ Bonger W. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta: PT Pembangunan, 1997. hlm. 12.

Alkoholisme didefinisikan sebagai penyakit degeneratif progresif akibat konsumsi alkohol berkepanjangan dan berlebihan yang berakibat pada kecanduan dan rusaknya kesehatan secara umum. Sering kali orang tidak menyadari bahwa apa yang dimulai sebagai kebiasaan minum alkohol bersama teman untuk acara sosial berubah menjadi kecanduan parah yang mengakibatkan efek buruk pada kesehatan fisik dan psikologis. Jadi alkoholisme juga merupakan suatu gejala sosial yang sangat kompleks yang terjadi dimasyarakat. Karena alkoholisme sendiri sebenarnya sudah tidak sesuai dengan adat istiadat bangsa Indonesia. Pada awalnya minuman beralkohol itu hanya digunakan oleh orang atau bangsa-bangsa di negara beriklim dingin, mereka menggunakannya untuk menghangatkan badan, memberikan kesegaran pada tubuh saat melakukan pekerjaan berat, bahkan dalam hal tertentu alkohol juga digunakan untuk medis.⁴

Sedangkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2010 mengenai Pelarangan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol dijelaskan bahwa minuman beralkohol merupakan produk yang sangat terkait dengan efek kesehatan dan dapat mempengaruhi perilaku penggunaannya dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga dalam pengedaran dan perdagangannya perlu dilakukan pelarangan, pengawasan dan pengendalian. Seiring dengan kemajuan budaya dan ilmu pengetahuan (IPTEK), perilaku manusia didalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks dan bahkan multikompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang

⁴ Wahyu Rahardjo. Konsumsi Alkohol, Obat-obatan Terlarang dan Perilaku Seks Berisiko: Suatu Studi Meta-Analisis. Jurnal Psikologi. Volume 35, No.1. 2015. hlm 5

dapat dikategorikan sesuai dengan norma pada umumnya dan norma hukum pada khususnya dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma tersebut dapat disebut sebagai penyimpangan terhadap norma yang telah ada dan disepakati bersama. Hal ini menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketenteraman kehidupan manusia.

Berbagai pengaruh dari kemajuan IPTEK, kemajuan budaya, dan perkembangan pembangunan pada umumnya bukan hanya orang dewasa, akan tetapi, anak-anak juga terjebak melanggar norma terutama norma hukum, sehingga dalam keadaan seperti ini kemungkinan akan terjebak dalam pola yang makin lama dapat menjurus pada tindakan kriminal, yang bermula dari mengkonsumsi minuman beralkohol hingga dapat menjurus kedalam tindakan seperti pemerasan pencurian, penganiayaan, pemerkosaan, dan sebagainya. Kebiasaan ini lah yang ditiru oleh masyarakat modern yang ada di Indonesia.⁵

Hal ini dapat dilihat dari perkembangan penyalahgunaan alkohol di masyarakat, alkohol yang seharusnya digunakan untuk peruntukannya misalnya digunakan untuk dunia medis, namun dalam perkembangannya penggunaan alkohol banyak disalah gunakan oleh sebagian masyarakat untuk membuat minuman beralkohol. Bahkan sekarang sudah sangat parah karena masyarakat saat ini sudah banyak yang keluar batas yaitu mencampuri alkohol dengan bahan kimia berbahaya.

⁵ Dinata, Gusti Surya. "*Faktor-faktor yang mempengaruhi remaja mengkonsumsi minuman keras.*" *Sosiologique Jurnal Ilmu Sosiologi*, 2013. hlm. 6

Kebiasaan masyarakat yang dulunya hidup sederhana, tidak sampai tidur tengah malam akan berubah gaya hidupnya yang serba mewah, foya-foya, tidur menjelang pagi, dan yang sangat mengkhawatirkan adalah penyalahgunaan minuman keras beralkohol sebagai gaya hidup baru masyarakat kita. Bahkan saat ini di restoran, swalayan, minimarket, kios sudah menyediakan minuman keras mulai dari harga murah hingga harga mahal. Kebiasaan masyarakat yang mulai menyimpang ini merupakan suatu cerminan dari cara hidup yang diterima sebagian masyarakat. Banyaknya masyarakat yang mengkonsumsi minuman alkohol yang akhirnya menjadikan minum minuman alkohol suatu kebiasaan. Kebiasaan masyarakat minum minuman alkohol ini dipengaruhi dari faktor lingkungan yang mengakibatkan banyaknya masyarakat dimulai dari usia muda yang bahkan belum memasuki usia dewasa ikut mengkonsumsi minuman alkohol. Gangguan kebiasaan ini biasanya terjadi akibat kurangnya pendidikan dari orang tua, tidak adanya larangan atau kurangnya perhatian orang tua dalam mendidik anak, akibatnya setelah anak memasuki tahap remaja dengan pikiran mulai berkembang, seorang anak yang kurang pendidikan dan perhatian orang tua akan menerima berbagai informasi dan kebiasaan yang mereka dapat dari luar seperti sekolah, masyarakat, media televisi, yang mengakibatkan seorang anak dapat menerima berbagai informasi tanpa mengetahui baik atau buruk, salah satunya kebiasaan mengkonsumsi minuman alkohol.⁶

⁶ Santoso, Agung, and M. Abdim Munib. "Upaya Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Keras Jenis Toak." JUSTITIABLE-Jurnal Hukum Vol 5.2 2023. hlm. 3

Kemudian karena terjadinya globalisasi yang sangat pesat dan tidak dapat terbendung tradisi meminum alkohol sampai di Indonesia. Di Indonesia banyak golongan masyarakat yang menyalahgunakan minuman beralkohol untuk mabuk-mabukan. Pengaruh globalisasi ini telah mendunia, bahkan sudah merambah sampai ke segala aspek kehidupan manusia. Dalam gaya hidup masyarakat modern sekarang tak lepas dari minuman beralkohol. Minuman beralkohol kini bukanlah hal yang tabu lagi dikalangan masyarakat. Bahkan peredarannya pun sudah tak terkendali. Walaupun telah ada undang-undang dan larangan yang jelas dari masing-masing agama tentang larangan peminum minuman keras, namun oknum-oknum nakal diluar sana tetap saja menjual miras dengan bebas demi meraup untung yang besar. Semakin lama hal tersebut menyebabkan terjadinya perubahan nilai terhadap minuman beralkohol dimasyarakat. Minuman beralkohol yang secara hukum maupun agama dianggap hal yang tidak baik menjadi sesuatu yang dianggap lumrah dan wajar untuk dilakukan. Minuman beralkohol ini dapat ditemui dengan mudah di tempat-tempat tertentu yang memang diperbolehkan untuk menjual minuman keras seperti, hotel, minimarket, bar atau restoran menjual bermacam-macam minuman beralkohol. Minuman beralkohol sering dikonsumsi masyarakat untuk bersenang-senang, berbagai acara yang diselenggarakan di suatu bar atau restoran selalu dilengkapi dengan minuman keras untuk memeriahkan acara. Tidak hanya di bar, restoran atau minimarket, minuman keras juga sering dijual dalam suatu acara pementasan musik.⁷

⁷Safri Miradj Dampak Minuman Keras Terhadap Perilaku Generasi Muda. Al-wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama Vol, 14. No 1 2020. hlm 7

Berbeda dengan budaya barat yang mengonsumsi minuman alkohol karena cuacanya yang dingin, minuman alkohol berguna untuk menghangatkan badan sehingga bisa melengkapi pertunjukan musik mereka. Berbeda dengan Indonesia yang tidak memiliki musim dingin, meminum alkohol disalahgunakan masyarakat bukan untuk menghangatkan diri melainkan untuk berfoya-foya. Pengaruh budaya barat yang dijadikan gaya hidup banyak masyarakat juga terjadi dalam berbagai pertunjukan musik di Indonesia, terutama pertunjukan musik yang membuat penonton berdansa dan meningkatkan adrenalinnya, sehingga minuman alkohol dapat meningkatkan adrenalin mereka dan dapat menambah kesenangan masyarakat.

Konsumsi yang berlebihan akan minuman beralkohol ini sering menimbulkan hal-hal yang negatif seperti kekerasan antar penonton, kekerasan seksual, pemerkosaan dan berbagai tindakan negatif yang dapat merugikan masyarakat. Penegakkan hukum dalam pengedaran minuman beralkohol dalam konser musik hingga saat ini hanya dengan sweeping yang dilakukan oleh petugas dari pemerintah seperti Satpol PP dengan menyita minuman alkohol tersebut serta sanksi administrasi.⁸ Pada bulan juli di kota Bandung terjadi kerusuhan antar penonton yang menimbulkan korban pada pertunjukan musik underground atau musik yang beraliran metal yang sangat identik dengan kekerasan, dalam konser tersebut, panitia acara membagikan beberapa minuman alkohol sebanyak 20 botol.⁹

⁸ Soenartha, Grace Angelia, and Tundjung Harning Sitabuana. "Perlindungan Hukum Konsumen Bagi Korban Atas Peredaran Minuman Keras Oplosan." *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* Vol 3, no. 05 2022: 598-608.

⁹ Chotim, Endah Ratnawaty, and Siti Umi Latifah. "Komunitas anak punk dan anomali sosial (studi kasus di Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung)." *JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 8, no. 1 2018. hlm 4

Tindakan pengedaran minuman beralkohol seperti kasus diatas sering dilakukan oleh para remaja, kenakalan remaja yang sampai saat ini mulai beragam dan biasanya dimulai dari mengkonsumsi minuman beralkohol, mengedarkan dan menjualnya kepada masyarakat. Ini membuktikan bahwa remaja saat ini kurang mendapatkan pembelajaran dan tidak menerima sosialisasi yang ditanamkan orang tua dan guru mereka di sekolah, dan mereka pun memberontak terhadap nilai-nilai masyarakat,¹⁰ selain itu, pengaruh dari media seperti adegan film yang menampilkan perilaku negatif seperti kekerasan, meminum minuman alkohol hingga mabuk, pengedaran minuman secara ilegal, adegan tersebut sering ditampilkan dalam film produksi negara barat atau negara kita sendiri, sehingga para remaja dengan mudah dapat terpengaruh yang berakibat mengganggu pertumbuhan mereka.¹¹

Dalam beberapa bulan terakhir pun terjadi pesta miras di Kota Bandung dimana para pendukung tim sepakbola mengkonsumsi minuman alkohol oplosan atau minuman alkohol yang yang dicampur dengan bahan-bahan lainnya yang tidak terjamin kandungannya. Kejadian tersebut mengakibatkan beberapa orang meninggal setelah mengkonsumsi miras tersebut.¹²

Selain itu ditemukan juga lokasi pembuatan minuman beralkohol palsu atau oplosan di Bandung dengan jumlah yang banyak.¹³ Kasus ini membuktikan masih

¹⁰ C. Dewi Wulansari, *Beberapa Penjelasan Teoritis Tentang Kenakalan Remaja*, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan 1994 hlm. 34

¹¹ Djisman Samosir, *Pro Justitia, Pengaruh Mass Media Terhadap Pertumbuhan Kejahatan*, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan 1997 hlm. 35

¹² <http://regional.liputan6.com/read/2821135/petaka-miras-oplosan-renggut-nyawa-5-bonek?source=search> diakses tanggal 25-10-2024

¹³ <http://www.tribunnews.com/regional/2016/12/19/polisi-gerebek-lokasi-pembuatan-miras-palsu> diakses tanggal 25-10-2024

banyak masalah terkait dengan pengendalian miras di Bandung sehingga masih banyak ditemukan berbagai penjualan, pembuatan miras yang tidak sesuai peraturan dan penjualan minuman beralkohol yang tidak memiliki Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITPMB). ITPMB adalah izin yang harus dimiliki badan usaha untuk bisa menjual minuman beralkohol yang diterbitkan oleh pemerintah guna menjaga ketertiban dan kenyamanan lingkungan agar tidak terjadi hal-hal yang melanggar undang-undang.

Dengan adanya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 dan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan di dalam KUHP juga dijelaskan bahwa dilarang mengedarkan minuman beralkohol tanpa izin, pengedaran yang dilakukan secara illegal, dan kepada anak dibawah umur, tapi hingga saat ini penjualan minuman beralkohol tidak memperhatikan usia pembeli, sehingga anak yang berusia dibawah umur juga dapat mengkonsumsi minuman beralkohol dengan mudah. Pemerintah daerah juga menerapkan aturan untuk mengendalikan dan mengawasi pengedaran minuman alkohol, salah satunya adalah Kota Bandung, Jawa Barat.

Pemerintah Kota Bandung membatasi pengedaran minuman keras dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pelarangan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol Pemerintah Kota Bandung memiliki peraturan daerah yang mengatur pelarangan, pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol melalui Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pelarangan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman

Beralkohol, Sehingga penjualan minuman beralkohol dan penggunaannya di kota Bandung dapat dibatasi sehingga tidak semua tempat bisa menjual minuman beralkohol dan tidak semua orang bisa mengkonsumsinya. Dalam bagian menimbang perda tersebut juga dijelaskan bahwa peredaran minuman beralkohol yang tidak terkendali dapat menimbulkan penyakit masyarakat sehingga tidak terjaminnya keamanan, ketentraman dan ketertiban serta kelestarian lingkungan di kota Bandung Dalam Pasal 5 ayat 2 dari Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2010 tersebut menyatakan bahwa minuman beralkohol dapat dijual di hotel berbintang 3 (tiga), 4 (empat, dan 5 (lima), restoran dengan tanda talam kaca dan talam selaka, pub karaoke, kelab malam, diskotik dan duty free shop.

Sikap Pemerintah Kota Bandung ditunjukkan dengan melaksanakan razia gabungan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), pihak kepolisian dan TNI di cafe-cafe dan tempat yang menjual minuman beralkohol di wilayah Kota Bandung, langsung dikawal dan diikuti oleh Walikota Bandung dengan melakukan operasi menutup tempat bir dan minuman keras di Kota Bandung yang tidak memiliki izin dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pelarangan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, karena minuman beralkohol tidak boleh dijual di sembarang tempat, tetapi hanya dijual di hotel bintang 3 ke atas, karaoke dan klub malam yang memiliki izin.

¹⁴Fakta yang diuraikan di atas, berkaitan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pelarangan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, Pasal 5 yang menyebutkan bahwa :

Pasal 5

- 1) Penjualan langsung Minuman Beralkohol golongan A, B dan C hanya diijinkan dijual secara eceran untuk diminum langsung di tempat usaha tertentu.
- 2) Tempat usaha tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Hotel berbintang 3 (tiga), Hotel Berbintang 4 (empat) dan Hotel Berbintang 5 (lima);
 - b. Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka;
 - c. Pub Karaoke, Kelab Malam, Diskotik; dan
 - d. Duty Free Shop
- 3) Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diijinkan untuk diminum di bar hotel dengan ketentuan kemasan tidak lebih besar dari 187 ml (seratus delapan puluh tujuh mililiter) per kemasan.
- 4) Penjualan Minuman Beralkohol pada tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya diperbolehkan untuk mereka dan yang telah berusia 21 (duapuluh satu) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Identitas atau Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Sanksi bagi yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sanksi administratif dimana izin untuk menjual akan dicabut, sedangkan sanksi pidana bagi yang melanggar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2010 Pasal 27 ayat (1) pelanggaran akan terkena pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Tapi sanksi pidana yang hanya selama 3 (tiga) bulan dirasa kurang efektif, karena walaupun adanya sanksi pidana, sanksi ini tidak menimbulkan efek jera kepada masyarakat sehingga program pembinaan ini dirasa kurang memadai.

¹⁴ Nasrudin, Khairu. "Penegakan Hukum Secara Terpadu Terhadap Tindak Pidana Peredaran Minuman Keras." *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol 12, no. 4 2017. hlm. 7

Walaupun dalam Peraturannya sudah dijelaskan mengenai pengedaran dan penjualan minuman keras, dan adanya ketentuan pidana pada Pasal 29 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2010 dimana setiap orang atau badan usaha dengan sengaja membawa, mengedarkan dan mengkonsumsi minuman beralkohol serta minuman lain yang memabukkan dikenakan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), nyatanya masih banyak terjadi pengedaran minuman keras yang tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan, masih banyak masyarakat yang melakukan usaha penjualan minuman beralkohol tanpa adanya izin menjual atau badan usaha yang melanggar ketentuan yang tercantum dalam perda, seperti mengedarkan minuman oplosan yang diketahui memiliki kandungan yang berbahaya dan tidak sesuai dengan perda, pengedaran minuman beralkohol yang dilakukan dirumah, bahkan beberapa pengedaran minuman alkohol tersebut tidak mempunyai izin dan dikemas melalui botol minuman air putih atau botol minuman yang dapat dibeli di minimarket untuk menghindari razia atau pengawasan dari petugas, tidak hanya itu, masih banyak berbagai acara kesenian, pentas musik berbagai aliran seperti konser dangdut yang biasanya ditujukan kepada masyarakat menengah kebawah menyediakan minuman alkohol yang biasanya diselundupkan kepada para penonton. Kasus-kasus seperti tentu memprihatinkan dan akan sangat membahayakan masyarakat Indonesia, terutama generasi muda yang masih

memiliki masa depan, untuk itu dibutuhkan penegakan hukum tidak hanya dari polisi, melainkan tugas dari semua subjek dalam masyarakat.¹⁵

Ada 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, faktor hukumnya, faktor penegak hukum, fasilitas, faktor lingkungan dimana hukum tersebut diterapkan dan kebudayaan. Dari kelima faktor tersebut bisa kita lihat bahwa dalam menegakkan hukum dibutuhkan 5 faktor tersebut, namun pada faktanya penegakkan hukum dalam peredaran minuman alkohol masih belum berjalan dengan baik, peredaran minuman alkohol secara ilegal dan penyelundupan kedalam konser masih sering terjadi, padahal berdasarkan asas pertanggungjawaban dalam hukum pidana, tidak di pidana jika tidak ada kesalahan, perbuatan pengedaran minuman alkohol ini menimbulkan banyak efek negatif yang merugikan masyarakat.

Pemerintah Kota Bandung mengakui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2010 terkait peredaran minuman beralkohol masih memiliki banyak kelemahan. Sehingga, Pemkot Bandung terus berkoordinasi dengan aparat keamanan yang dalam hal ini Polrestabes Bandung untuk menciptakan Bandung menjadi kota yang aman dan kondusif. Pemerintah Kota Bandung mengapresiasi kepada pihak kepolisian yang sudah bekerja keras membantu pemberantasan minuman beralkohol ilegal dan akan terus membangun kebersamaan dengan unsur

¹⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006, hlm. 307

pimpinan kedaerahan yang lain, seperti pihak Kepolisian dan TNI, agar dapat terus melakukan kegiatan secara sinergi.¹⁶

Razia juga dilakukan pada bulan januari oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung. Penertiban dilakukan bersama Denpom dan Polrestabes Bandung. Penertiban dan Penindakan Represif Non-Yustisial lingkup Ketertiban Umum atas pelanggaran penjualan dan peredaran minuman beralkohol tanpa izin ini membuahkan hasil. Satpol PP Kota Bandung mengamankan 295 botol minuman beralkohol dari berbagai jenis dan merk dari 2 toko di Jalan Moh Toha Bandung.¹⁷ Operasi razia miras juga dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung saat menggerebek dua kios minuman keras (miras) di Jalan Pasirkoja, Bandung. Kemudian diamankan minuman beralkohol berbagai merk dan golongan, sebanyak 569 botol oleh Satpol PP bersama dengan satuan reserse Narkoba Polrestabes Bandung.¹⁸ Saat razia, petugas Satpol PP Kota Bandung menyisir setiap kios. Mereka pun langsung mengeledah setiap kios dan menemukan miras ratusan botol.

Berikut ini jumlah kasus minuman keras setiap tahunnya dari tahun 2021 sampai tahun 2024¹⁹

¹⁶ Rohadi & Krisyah, Sri. Peran Polisi Masyarakat (POLMAS) Dalam Menangani Perbuatan Akibat Minuman Keras Di Wilayah Hukum Polres. Jurnal Hukum Khaira Ummah 2017. hlm. 7

¹⁷<https://www.detik.com/jabar/berita/d-7127341/satpol-pp-bandung-sita-ratusan-botol-miras-ilegal-di-moh-toha-bandung> diakses tanggal 16-11-2024

¹⁸<https://jabar.tribunnews.com/2024/10/30/satpol-pp-bandung-amankan-miras-ratusan-botol-penjualnya-disidang-dan-dikasih-sanksi> diakses tanggal 16-11-2024

¹⁹ Wawancara dengan narasumber Satuan Polisi Pamong Praja

Tabel 1.1

Jumlah kasus Peredaran Miras di wilayah Kota Bandung

Tahun	Mengedarkan Miras Tanpa Izin	Mengedarkan Miras Oplosan	Total
2021	2 Kasus	1 kasus	3 kasus
2022	3 kasus	1 kasus	4 kasus
2023	3 kasus	2 kasus	5 kasus
2024	2 kasus	3 kasus	5 kasus

Namun dalam kenyataannya masih banyak kita temukan penjual minuman keras oplosan yang tersebar di berbagai tempat di kota Bandung, bahkan para penjual secara terang-terangan memasang pamflet atau banner dengan logo minuman keras didalamnya. Maka berdasarkan penjelasan diatas penulis tertarik untuk meneliti mengenai Problematika **“Penegakan Hukum Terhadap Sanksi Pidana Peredaran Minuman Keras Oplosan Di Wilayah Kota Bandung Dihubungkan Dengan Peraturan Daerah Kota Bandung No 11 Tahun 2010 Tentang Pelarangan Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, peneliti mengidentifikasi beberapa permasalahan antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana Penegakan Hukum terhadap sanksi pidana peredaran minuman keras Oplosan di wilayah Kota Bandung?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam Penegakan Hukum terhadap sanksi pidana peredaran minuman keras Oplosan di wilayah Kota Bandung?
3. Upaya Apakah yang dilakukan dalam menghadapi kendala Penegakan Hukum terhadap sanksi pidana peredaran minuman keras Oplosan di wilayah Kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Penegakan Hukum terhadap sanksi pidana peredaran minuman keras Oplosan di wilayah Kota Bandung
2. Kendala dalam Penegakan Hukum terhadap sanksi pidana peredaran minuman keras Oplosan di wilayah Kota Bandung
3. Upaya yang dilakukan dalam menghadapi Kendala Penegakan Hukum terhadap sanksi pidana peredaran minuman keras Oplosan di wilayah Kota Bandung

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan-tujuan yang telah dipaparkan di atas maka dapat diperoleh suatu manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan bisa berguna untuk memperkaya pengetahuan pembaca dalam memahami ilmu pengetahuan hukum, khususnya pemahaman dalam peredaran minuman keras serta pemahaman tentang pengawasan dan pengendalian peredaran minuman keras di Kota Bandung.

b. Manfaat Praktis

Mengetahui problematika pengendalian peredaran minuman keras guna sebagai bahan kajian ulang kepada pemerintah tentang pembaharuan nya suatu peraturan serta Penelitian ini di harapkan bisa menjadi bahan untuk masukan dan evaluasi bagi pemerintah dan penegak hukum sebagai *social control* dalam pelaksanaan Perda No 11 tahun 2010 Kota Bandung serta penanganan permasalahan minuman keras di Kota Bandung.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

1.	Remmy Kusuma Ningrum	<i>Penegakan Hukum Dalam Pengendalian Peredaran Minuman Keras</i>	2021	Pada penelitian ini membahas terkait pengendalian peredaran minuman keras oleh aparat penegak hukum di kota Bekasi
----	----------------------------	---	------	--

		<p><i>Dan</i></p> <p><i>Problematikanya</i></p> <p><i>Di Kota Bekasi</i></p>		<p>serta mengetahui problematika yang dihadapinya.</p> <p>Pada penelitian saya yang membedakannya yaitu terletak pada locus penelitian serta bahasan yang lebih khusus mengenai sanksi pidana bagi pelaku pengedar miras oplosan di Kota Bandung.</p>
2.	Thariq Abieza Hakim	<p><i>Efektivitas</i></p> <p><i>Pelaksanaan</i></p> <p><i>Perda Kota</i></p> <p><i>Bandung Nomor</i></p> <p><i>11 Tahun 2010</i></p> <p><i>Tentang</i></p> <p><i>Pelarangan</i></p> <p><i>Pengawasan Dan</i></p> <p><i>Pengendalian</i></p> <p><i>Minuman</i></p> <p><i>Beralkohol</i></p> <p><i>Ditinjau Dari</i></p> <p><i>Penerbitan Izin</i></p>	2017	<p>Pada penelitian ini membahas mengenai efektivitas penerapan peraturan daerah kota bandung nomor 11 tahun 2010 ditinjau dari perizinan tempat penjual minuman keras tersebut dimana dalam penelitian ini mengidentifikasi perizininian dari tempat yang menjual minuman keras di kota Bandung.</p> <p>Perbedaan nya dengan penelitian saya yaitu penelitian saya tidak berfokus kepada perizinan</p>

		<p><i>Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Di Kota Bandung</i></p>		<p>melainkan berfokus pada sanksi pidana yang dikenakan.</p>
3.	Rian Putra Pratama	<p><i>Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Mengedarkan Miras Tanpa Izin (Illegal) Di Kota Tarakan (Study Kasus Kota Tarakan)</i></p>	2021	<p>Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Apakah peran Kepolisian Polres Kota Tarakan dalam penanggulangan tindak pidana minuman keras tanpa izin dan kendala kepolisian dalam penanggulangan tindak pengendaraan minuman keras tanpa izin di Kota Tarakan dan upaya Pemerintah Kota Polres Tarakan dalam mengatasi kendala tersebut.</p> <p>Pada penelitian saya yang membedakannya yaitu terletak pada locus penelitian serta bahasan yang lebih khusus mengenai sanksi pidana bagi</p>

				pelaku pengedar miras oplosan di Kota Bandung.
4.	Afif Nurohman	<i>Peran Kepolisian Dalam Menaggulangi Peredaran Dan Perdagangan Miras Tanpa Izin Di Wilayah Hukum Polres Salatiga</i>	2022	<p>Pada penelitian ini membahas mengenai upaya Polres Salatiga dalam menanggulangi peredaran serta perdagangan minuman keras tanpa izin di wilayah hukum Polres Salatiga serta membahas mengenai tindakan yang dilakukan oleh Polres Salatiga yang mencakup tindakan non-yustisial dan pro-yustisia.</p> <p>Pada penelitian saya yang membedakannya yaitu terletak pada locus penelitian serta</p>

				<p>bahasan yang lebih khusus mengenai sanksi pidana bagi pelaku pengedar miras oplosan di Kota Bandung.</p>
5.	Mohamad Rizkia	<p><i>Upaya Pencegahan Terhadap Peredaran Minuman Keras Oleh Kepolisian Resor Demak</i></p>	2021	<p>Pada penelitian ini membahas mengenai upaya pencegahan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Demak dalam mencegah peredaran minuman keras ilegal serta modus yang dilakukan oleh pelaku penjual miras ilegal dalam mengedarkan minuman keras ilegal di Kabupaten Demak.</p> <p>Pada penelitian saya yang membedakannya yaitu terletak pada locus penelitian serta bahasan yang lebih khusus mengenai sanksi pidana bagi pelaku pengedar miras oplosan di Kota Bandung.</p>

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yaitu suatu konsep untuk mengelaborasi suatu teori-teori yang akan digunakan sebagai landasan pemikiran untuk mengkaji suatu penelitian dalam hal ini kerangka pemikiran dijadikan sebagai suatu referensi dari teori yang akan digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan pernyataan di atas, maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Negara Hukum, teori Kontrol Sosial, serta teori Penegakan Hukum

1. Teori Negara Hukum

Sebelum membahas tentang negara hukum perlu kiranya dipahami tentang apa yang dimaksud dengan negara dan apa itu hukum? Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan yang ditaati oleh rakyatnya.²⁰ Lahirnya negara disebabkan oleh *figur primus inter pares* yang telah menjadi raja kemudian bertindak sewenang-wenang sehingga menjadi kerajaan yang absolut dimana pemerintah pusat sudah dapat menundukan pemerintah daerah, sehingga ada kesatuan kewibawaan. Sedangkan hukum adalah peraturan-peraturan tertulis atau tidak tertulis, yang mengatur tentang tingkah laku manusia yang dibuat badan resmi, dan bersifat memaksa, sehingga pelanggaran terhadap peraturan tersebut menimbulkan sanksi atau hukuman tertentu. Tujuan dari hukum itu sendiri untuk mendatangkan kedamaian dalam masyarakat, mewujudkan keadilan, dan menjaga supaya manusia diperlakukan sebagai manusia. Tujuan-tujuan tersebut terarah kepada upaya memberikan perlindungan bagi

²⁰ Abdullah Mahmud and Suyoto Arief, *Tata Negara 3*, Ponorogo: Darussalam Press, 1998. hlm. 159

kepentingan individu dan masyarakat secara seimbang. Sehingga diharapkan terwujud kehidupan masyarakat yang damai, karena tiap-tiap orang diperlakukan secara adil dan manusiawi.²¹ Hukum mempunyai dua fungsi dalam kehidupan masyarakat yaitu sebagai berikut:

- a. Hukum berfungsi sebagai alat kontrol sosial
- b. Sebagai *social engineering*.

Diskursus tentang negara hukum sudah tidak lagi asing dalam ilmu pengetahuan ketatanegaraan sejak zaman dahulu sampai sekarang. Ide tentang negara hukum sudah lama dipikirkan oleh para filsuf zaman Yunani kuno. Plato dalam bukunya *The Republic* menyatakan bahwa untuk menciptakan suatu negara yang ideal, maka negara tersebut harus berintikan kebaikan. Agar kebaikan tersebut dapat terwujud maka harus melakukan supremasi hukum.²² Negara hukum pada prinsipnya menghendaki segala tindakan atau perbuatan penguasa mempunyai dasar hukum yang jelas atau ada legalitasnya berdasarkan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

Negara hukum adalah negara yang segala kegiatannya untuk menyelenggarakan pemerintahannya didasarkan atas hukum yang berlaku di negara tersebut. Misalnya pemerintah melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan hukum yang berlaku di negara tersebut dan rakyat harus tunduk dengan hukum pula. Jadi dalam negara hukum pemerintah atau penguasa bukan hanya harus bertindak

²¹ Abdullah Mahmud and Suyoto Arief, *Tata Negara 2*, Ponorogo: Darussalam Press, 1998.hlm. 74

²² Mahkamah Konsititusi, *Modul Pendidikan Negara Hukum Dan Demokrasi*, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, 2016. hlm. 8

berdasarkan hukum, tetapi juga harus mempertanggungjawabkan segala tindakanya secara hukum.

Ada beberapa ciri khas dari suatu dari suatu negara hukum yaitu:

- a. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan budaya.
- b. Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan atau kekuatan apapun.
- c. Legalitas, dalam arti hukum dalam segala bentuknya.

Menurut F.J Stahl (*eropa kontinental*) unsur-unsur negara hukum dapat disebut sebagai berikut:

- a. Adanya jaminan hak asasi manusia;
- b. adanya peradilan administrasi dalam perselisihan;
- c. Pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan;
- d. Adanya peradilan administrasi dalam perselisihan;

Menurut Dicey (*anglo saxon*) negara hukum harus mengakui tiga unsur:

- a. Supremasi aturan-aturan hukum;
- b. Kedudukan yang sama di depan hukum;
- c. Terjaminnya hak-hak asasi manusia dalam UU/UUD.

Konsep negara hukum modern di eropa kontinental dikembangkan oleh Imanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, dan Fichte, dengan istilah jerman yaitu "*rechtsstaat*". Sedangkan dalam tradisi anglo saxon, konsep negara hukum dikembangkan oleh A.V Dicey, dengan sebutan "*the rule of law*". Selain itu,

konsep negara hukum juga terkait dengan istilah nomokrasi yang berarti bahwa hukum adalah penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan negara.²³

Indonesia menganut konsep negara hukum hal ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sebagai konsekuensi logisnya, maka tata kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara harus berpedoman pada norma-norma hukum. Hukum ditempatkan sebagai panglima di atas bidang-bidang lain seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Konsep negara hukum yang dianut oleh Indonesia adalah konsep negara hukum aktif dan dinamis. Model negara hukum seperti ini menjadikan pihak yang aktif berorientasi pada pemenuhan dan perwujudan kesejahteraan rakyat sesuai dengan prinsip “*welvaarstaat*”. Setiap tindakan yang terjadi dalam sistem ketatanegaraan harus sesuai dengan prinsip hukum. Hukum dalam hal ini adalah hierarki tatanan norma yang berpuncak pada konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Dan hukum yang diterapkan harus mencerminkan kehendak rakyat, sehingga menjamin adanya peran serta warga negara dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan. Hukum dibuat bukan untuk memenuhi Hasrat dari yang berkuasa, melainkan hukum dibentuk untuk menjamin kepentingan dari warga negara.²⁴

Menurut Hans Kelsen, untuk terpenuhi sebagai negara hukum (*rechtsstaat*), maka setidaknya harus memiliki 4 syarat yaitu sebagai berikut: a. Negara yang kehidupannya sejalan dengan konstitusi dan Undang-Undang; b. Negara

²³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitualisme Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005. hlm. 152

²⁴ Airlangga, Shandi Patria. "*Hakikat Penguasa Dalam Negara Hukum Demokratis.*" Cepalo Vol 3, no. 1 2019: hlm. 10

bertanggung jawab atas kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh penguasa; c. Negara yang menjamin atas kemerdekaan kekuasaan kehakiman serta adanya peradilan administrasi negara; d. Negara wajib melindungi hak asasi manusia (HAM); Dari syarat negara hukum yang dinyatakan oleh Hans Kelsen diatas, maka dapat dipahami bahwa hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan negara hukum yang tentunya mengedepankan dan melindungi hak asasi manusia. Oleh karena itu berbicara tentang negara hukum maka berbicara tentang hak asasi manusia. Dimanapun suatu negara hukum, tujuan pokoknya adalah melindungi hak asasi manusia dan menciptakan kehidupan bagi warga yang demokratis.

Keberadaan suatu negara hukum menjadi prasyarat bagi terselenggaranya hak azasi manusia dan kehidupan demokratis. Dasar filosofi perlunya perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia adalah bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar kodrati setiap orang yang keberadaannya sejak berada dalam kandungan, dan ada sebagai pemberian tuhan, oleh karena itu negara wajib melindunginya. Perlindungan hak azasi manusia di Indonesia secara yuridis didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.²⁵

2. Teori Pengendalian sosial atau Kontrol Sosial

Hukum dalam artian sebagai alat kontrol sosial mempunyai fungsi untuk menjaga agar setiap orang menjalankan perannya sesuai dengan sistem sosial yang berlaku. Tetapi apabila masyarakat tidak menjalankan sesuai dengan ketentuan

²⁵ Nurwahyuni, Nurwahyuni, Siti Sumartini, and Saeful Kholik. "Kedudukan Hukum Dalam Perspektif Negara Hukum Modern." *Jurnal Suara Hukum* Vol 4, no. 1 2022: hlm. 13

sistem sosial, maka hukum akan memberikan hukuman yang sesuai dengan pelanggaran tersebut.²⁶ Upaya pencegahan atau pengendalian agar masyarakat tidak melakukan pelanggaran tata aturan, maka di dalam kelompok masyarakat tersebut pasti terdapat seperangkat nilai dan norma tidak lain adalah untuk mencegah atau mengurangi pelanggaran tata aturan. Inilah yang disebut sebagai bentuk pengendalian sosial (*Social control*). Dengan demikian pengendalian social (*Social control*) adalah pengawasan dari kelompok atau individu lain yang mengarahkan peran individu atau kelompok sebagai bagian dari masyarakat agar tercipta situasi kemasyarakatan sesuai dengan harapan sosial, yaitu kehidupan sosial yang kompromis.²⁷

Menurut Joseph S. Roucek, mengartikan pengendalian sosial sebagai proses baik direncanakan maupun tidak di rencanakan yang bersifat mendidik, mengajak, bahkan memaksa warga-warga masyarakat agar mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai sosial yang berlaku.

Sementara, Peter L. Berger memberikan batasan atau pengertian pengendalian sosial dengan berbagai cara yang digunakan masyarakat untuk menertibkan keanggotaannya yang berbuat menyimpang.²⁸

Hukum, bukan hanya sebagai alat kontrol sosial, melainkan juga sebagai alat pengendali memainkan peran pasif. Artinya bahwa hukum menyesuaikan diri dengan kenyataan masyarakat yang dipengaruhi oleh keyakinan dan ajaran falsafat

²⁶ Zulfatun Ni'mah, *Sosiologi Hukum Suatu Pengantar*, Teras, Yogyakarta, 2012, hlm. 76

²⁷ Hasaniah, Zakiatul, and Ikhwan Ikhwan. "Kontrol Sosial Lembaga Adat terhadap Kenakalan Remaja." *Jurnal Pendidikan Tambusai* Vol 5, no. 2 2021: hlm. 14

²⁸ Ida Bagus Sudarma Putra, *Sosial Control : Sifat Dan Sanksi Sebagai Sarana kontrol Sosial*, Volume Xiii, No.1, Maret 2018, hlm 28.

lain yang diperpegangnya. Dalam hal ini, fungsi hukum ini lebih diperluas sehingga tidak hanya dalam bentuk paksaan. Fungsi ini dapat dijalankan oleh dua bentuk:²⁹

- a. Pihak penguasa negara. Fungsi ini dijalankan oleh suatu kekuasaan terpusat yang berwujud kekuasaan negara yang dilaksanakan oleh the ruling class tertentu. Hukumnya biasanya dalam bentuk hukum tertulis dan perundang-undangan.
- b. Masyarakat. fungsi ini dijalankan sendiri oleh masyarakat dari bawah. Hukumnya biasa berbentuk tidak tertulis atau hukum kebiasaan

Pada dasarnya, kontrol sosial merupakan lembaga sosial yang berperan melakukan pengendalian perilaku anggota masyarakat agar kehidupan sosial tetap dalam keadaan Kondusif. Akan tetapi, efektivitas dari peranan control social akan sangat tergantung pas efektivitas kekuatan sanksi yang dijatuhkan pada para pelanggar. Ada tiga sanksi yang digunakan didalam usaha menciptakan tertib social diantaranya:³⁰

- a. Sanksi fisik, yaitu sanksi yang mengakibatkan penderitaan fisik pada pihak yang terbebani sanksi tersebut, misalnya didera, dipenjara, diikat, dijemur dipanas matahari, tidak diberi makan, dihukum mati, dan sebagainya.
- b. Sanksi Psikologis, yang merupakan beban penderitaan yang dikenakan pada pihak yang terbebani sanksi dengan beban kejiwaan, seperti

²⁹ Ashadi I diab, *Peranan Hukum Sebagai Social Control, Social Engineering Dan Social Welfare*, Vol. 7 No. 2, Juli 2014, hlm 28-29

³⁰ Setiadi, Elly M. dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Kencana 2010, hlm 258.

dipermalukan di muka umum, diumumkan kejahatannya mereka di berbagai media massa sehingga aibnya diketahui oleh khalayak, dicopot kepangkatannya di suatu upacara, dan sebagainya.

- c. Sanksi Ekonomik yang merupakan beban penderitaan yang dikenakan kepada pelanggar norma berupa pengurangan benda dalam bentuk penyitaan dan denda, membayar ganti rugi, dan sebagainya.

Fungsi hukum sebagai alat kontrol sosial dapat berjalan dengan baik bila terdapat hal-hal yang mendukungnya. Pelaksanaan fungsi ini sangat berkait dengan materi hukum yang baik dan jelas. Selain itu, pihak pelaksana sangat menentukan pula. Orang yang akan melaksanakan hukum ini tidak kalah peranannya. Suatu aturan atau hukum yang sudah memenuhi harapan suatu masyarakat serta mendapat dukungan, belum tentu dapat berjalan dengan baik bila tidak didukung oleh aparat pelaksana yang komit terhadap pelaksanaan hukum.³¹

3. Teori Penegakan Hukum

Hukum sebagai social engineering atau social planning berarti bahwa hukum sebagai alat yang digunakan oleh *agent of change* atau pelopor perubahan yang diberi kepercayaan oleh masyarakat sebagai pemimpin untuk mengubah masyarakat seperti yang dikehendaki atau direncanakan. Hukum sebagai tatanan perilaku yang mengatur manusia dan merupakan tatanan pemaksa, maka agar hukum dapat berfungsi efektif mengubah perilaku dan memaksa manusia untuk

³¹ Muslihin, *Hukum Sebagai Alat Kontrol Sosial (Law As A Tool Of Social Control)*, 2012 hlm. 44

melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam kaedah hukum, maka hukum tersebut harus disebarluaskan sehingga dapat melembaga dalam masyarakat.

Di samping pelembagaan hukum dalam masyarakat, perlu dilakukan penegakan hukum (*law enforcement*) sebagai bagian dari rangkaian proses hukum yang meliputi pembuatan hukum, penegakan hukum, peradilan serta administrasi keadilan. Satjipto Raharjo menyampaikan pendapatnya mengenai penegakan hukum (*law enforcement*) adalah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat. Setelah pembuatan hukum dilakukan, maka harus dilakukan pelaksanaan konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hal tersebut merupakan penegakan hukum. Namun dalam istilah lain sering disebut penerapan hukum, atau dalam istilah bahasa asing sering disebut *rechistoepassing* dan *rechtshandhaving* (Belanda), *law enforcement* dan *application* (Amerika).³²

Penegakan hukum merupakan tugas eksekutif dalam struktur kelembagaan negara modern, dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif dimaksud, atau yang disebut birokrasi penegakan hukum. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam peraturan (hukum) sesuai dengan bidang-bidang yang ditangani (*welfare state*).³³

Penegakan hukum menurut pendapat Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan

³² Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2008, hlm. 175-183

³³ Soekanto, S. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo 2007. hlm 64.

kedamaian pergaulan hidup.³⁴ Dalam hal penegakan hukum di Indonesia khususnya dalam pemberantasan korupsi, Satjipto Raharjo berpandangan bahwa pada umumnya kita masih terpeka cara penegakan hukum yang konvensional, termasuk kultur. Hukum yang dijalankan berwatak liberal dan memiliki kultur liberal yang hanya menguntungkan sejumlah kecil orang (*privileged few*) di atas “penderitaan” banyak orang.³⁵ Untuk mengatasi ketidakseimbangan dan ketidakadilan itu, kita bisa melakukan langkah tegas (*affirmative action*). Langkah tegas itu dengan menciptakan suatu kultur penegakan hukum yang beda, sebutlah kultur kolektif. Mengubah kultur individual menjadi kolektif dalam penegakan hukum memang bukan hal yang mudah.

Sudikno Mertokusumo, mengatakan bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, sehingga hukum harus dilaksanakan secara normal, damai, tetapi dapat terjadi pula pelanggaran hukum, sehingga hukum harus ditegakkan agar hukum menjadi kenyataan.³⁶ Dalam penegakan hukum mengandung tiga unsur, pertama kepastian hukum (*rechtssicherheit*), yang berarti bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku dan tidak boleh menyimpang, atau dalam pepatah meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan (*fiat justitia ruat caelum*). Hukum harus dapat menciptakan kepastian hukum karena hukum bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Kedua kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), karena hukum untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru

³⁴ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2008, hlm. 3

³⁵ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2008, hlm. 145-46

³⁶ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2005, hlm. 160-161

karena hukumnya diterapkan menimbulkan keresahan masyarakat. Ketiga keadilan (*gerechtigheit*), bahwa dalam pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus adil karena hukum bersifat umum dan berlaku bagi setiap orang dan bersifat menyamaratakan.

Tetapi hukum tidak identik dengan keadilan karena keadilan bersifat subyektif, individualistik dan tidak menyamaratakan. Penegakan hukum menurut A. Hamid S. Attamimi seperti yang dikutip Siswanto Sunarno pada hakikatnya adalah penegakan norma-norma hukum, baik yang berfungsi suruhan (*gebot, command*) atau berfungsi lain seperti memberi kuasa (*ermachtigen, to empower*), membolehkan (*erlauben, to permit*), dan menyimpangi (*derogieren, to derogate*). Lebih lanjut Siswanto Sunarno mengatakan bahwa dalam suatu negara berdasarkan atas hukum materil atau sosial yang bertekad memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa maka penegakan hukum peraturan perundang-undangan tidak dapat dicegah.³⁷

Andi Hamzah mengemukakan penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris *Law Enforcement*, bahasa Belanda *rechtshandhaving*. Beliau mengutip *Handhaving Milieurecht*, 1981, *Handhaving* adalah pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen administratif, kepidanaan atau keperdataan dicapai penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual. *Handhaving* meliputi *fase law enforcement* yang berarti penegakan hukum secara represif dan *fase compliance* yang berarti preventif.³⁸

³⁷ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2008, hlm. 42

³⁸ Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 48-49

Koesnadi Hardjasoemantri mengemukakan: Perlu diperhatikan bahwa penegakan hukum dilaksanakan melalui berbagai jalur dengan berbagai sanksinya, seperti sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana”.³⁹ Lebih lanjut Koesnadi Hardjasoemantri mengatakan bahwa:

“Penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak, masyarakat bukan penonton bagaimana hukum ditegakkan, akan tetapi masyarakat aktif berperan dalam penegakan hukum”.

Keith Hawkins mengemukakan seperti yang dikutip Koesnadi Hardjasoemantri bahwa: Penegakan hukum dapat dilihat dari dua sistem atau strategi, yang disebut *compliance dengan conciliatory style* sebagai karakteristiknya dan *sanctioning dengan penal style* sebagai karakteristiknya. Pendapat lain dari *Milieurecht* yang juga dikutip Koesnadi Hardjasoemantri mengatakan bahwa:

“Penyidikan serta pelaksanaan sanksi administrasi atau sanksi pidana merupakan bagian akhir (*Sluit stuk*) dari penegakan hukum. Yang perlu ada terlebih dahulu adalah penegakan preventif, yaitu pengawasan atas pelaksanaan peraturan. Pengawasan preventif ini ditujukan kepada pemberian penerangan dan saran serta upaya meyakinkan seseorang dengan bijaksana agar beralih dari suasana pelanggaran ke tahap pemenuhan ketentuan peraturan”.⁴⁰

4. Teori Pidanaan

Teori-teori pidanaan berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan

³⁹ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2000, hlm. 375

⁴⁰ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2000, hlm. 376

pemidanaan, yaitu teori absolut (retributif), teori relatif (deterrence/utilitarian), teori penggabungan (integratif), teori treatment dan teori perlindungan sosial (social defence). Teori-teori pemidanaan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana.⁴¹

Teori absolut (teori retributif), memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (vergelding) si pelaku harus diberi penderitaan.⁴²

Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Pembalasan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan.⁴³ Penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain.⁴⁴ Menurut Hegel bahwa, pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan.

⁴¹ Dwidja Priyanto, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, Bandung : PT. Rafika Aditama, 2009, hlm 22.

⁴² Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hlm 105.

⁴³ Dwidja Priyanto, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, Bandung : PT. Rafika Aditama, 2009, hlm 24

⁴⁴ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah Filsafat, teori, dan ilmu hukum : pemikiran menuju masyarakat yang berkeadilan dan bermartabat Jakarta : Rajawali Pers, 2012 hlm 90.

Ciri pokok atau karakteristik teori retributif, yaitu :⁴⁵

- a. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan ;
- b. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana ;
- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar ;
- e. Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

Teori relatif (deterrence), teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) kejahatan.

Menurut Leonard, teori relatif pemidanaan bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku

⁴⁵ Dwidja Priyanto, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, Bandung : PT. Rafika Aditama, 2009, hlm 26

penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Tujuan pidana adalah tertib masyarakat, dan untuk menegakan tata tertib masyarakat itu diperlukan pidana.⁴⁶

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dasar pembenaran pidana terletak pada tujuannya adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Sehingga teori ini sering juga disebut teori tujuan (utilitarian theory).

Adapun ciri pokok atau karakteristik teori relatif (utilitarian), yaitu :

- a. Tujuan pidana adalah pencegahan (prevention) ;
- b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat ;
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana ;
- d. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan ;

⁴⁶ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah Filsafat, teori, dan ilmu hukum : pemikiran menuju masyarakat yang berkeadilan dan bermartabat Jakarta : Rajawali Pers, 2012 hlm 96-97

- e. Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Teori gabungan (integratif) mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.⁴⁷

Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu :

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat;
- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Berdasarkan teori-teori pemidanaan yang dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa tujuan pemidanaan itu sendiri merumuskan perpaduan antara kebijakan penal dan non-penal dalam hal untuk menanggulangi kejahatan. Di sinilah peran negara melindungi masyarakat dengan menegakan hukum. Aparat

⁴⁷ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2010, hlm 162-163.

penegak hukum diharapkan dapat menanggulangi kejahatan melalui wadah Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System).

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini berjenis kualitatif, Penelitian kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam tentang suatu fenomena melalui pengumpulan dan analisis data kualitatif. Metode penelitian kualitatif dirancang untuk mempelajari kehidupan manusia dalam situasi yang terbatas dan kasuistik, tetapi dengan kedalaman yang menyeluruh, tanpa mengurangi aspek-aspeknya yang eksklusif.⁴⁸

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yang mana dalam metode ini penulis menjabarkan maksud dari penelitian dengan cara menganalisis terlebih dahulu apa yang akan dibahas lalu mendeskripsikannya sesuai dengan pemahaman penulis yang didukung oleh sumber-sumber yang relevan terkait dengan “Penegakan Hukum Terhadap Sanksi Pidana Peredaran Minuman Keras Oplosan Di Wilayah Kota Bandung Dihubungkan Dengan Peraturan Daerah Kota Bandung No 11 Tahun 2010 Tentang Pelarangan Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol”

Pendekatan yang digunakan pada penulisan ini berupa pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum

⁴⁸ Burham Ashshofa, *Metode Penelitian Kualitatif* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001. hlm. 54.

(baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.⁴⁹

2. Jenis Data

- a. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti langsung dari lapangan, yang berupa wawancara langsung oleh narasumber dari penegak hukum yang bersangkutan. Dalam hal ini hasil yang diperoleh adalah data langsung dari wawancara dengan narasumber anggota Satuan Polisi Pamong Praja Bapak Henri Kusumah.
- b. Data sekunder adalah data yang di peroleh secara tidak langsung atau tidak langsung dari sumbernya. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang menyangkut tentang permasalahan minuman keras yang bersumber dari studi kepustakaan.
- c. Data tersier adalah data penunjang, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap sumber data primer dan sekunder, di antaranya adalah kamus dan ensiklopedi.

3. Sumber Data

Sumber data adalah mengenai dari mana data di peroleh. Kualitas dari adanya sumber data mempengaruhi juga kualitas dari penelitian yang di lakukan.

⁴⁹ Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005. hlm.

Sumber utama data pada penelitian ini menggunakan data primer dan di lengkapi oleh data sekunder.

- a) Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat di masyarakat. Dalam penelitian ini digunakan bahan yang berupa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Bahan hukum Primer yang digunakan yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Presiden No 74 tahun 2013, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2014, Peraturan Daerah No 11 tahun 2010 Kota Bandung.
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum ini memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi bahan hukum primer dan implementasinya. Bahan hukum Sekunder seperti jurnal penelitian, skripsi terdahulu, dan buku buku penunjang yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c) Bahan hukum Tersier yaitu bahan hukum pelengkap guna memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Seperti kamus hukum, internet dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan tiga metode seperti penelitian perpustakaan (*library research*), wawancara dan dokumentasi.

- a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu pertemuan antara dua orang atau lebih dengan membicarakan suatu topik yang berfokus dalam satu hal yang akan diteliti. Yang nantinya hasil dari wawancara tersebut dapat dilaborasikan dalam sebuah penelitian

b. Studi Pustaka

Penelitian kepustakaan adalah membaca dan mempelajari berbagai dokumen dan peraturan yang sedang diteliti.⁵⁰ Penelitian studi pustaka dapat dilakukan di tempat-tempat yang memiliki bahan-bahan pustaka seperti perpustakaan. Serta penulis juga akan mengkaji bahan-bahan pustaka lain seperti majalah artikel berita dari media serta jurnal-jurnal yang sudah dipublikasikan

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan mencatat berkas-berkas dan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk menunjang suatu penelitian Menurut Suharsimi Arikunto, dokumen berasal dari kata dokumen yang artinya tertulis. Saat melakukan metode dokumentasi, peneliti meneliti objek tertulis.⁵¹

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif melalui deskripsi dalam bentuk tulisan dan teks yang mudah dibaca dan dipahami untuk menarik interpretasi dan kesimpulan guna menjawab pertanyaan penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan deskriptif. Dengan kata lain, hasil penelitian ini dituangkan dalam bentuk penjelasan tertulis dan tekstual yang mudah

⁵⁰ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, Pustaka Setia, 2011. hlm. 225

⁵¹ Suharsimi Arikunto, *Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Reka Cipta, 2011. hlm. 71

dibaca, dipahami, ditafsirkan, dan ditarik kesimpulannya. Penarikan kesimpulan dapat dilakukan secara induktif, yaitu penarikan kesimpulan berdasarkan fakta-fakta tertentu, kemudian penarikan kesimpulan yang bersifat umum, dan pemberian rekomendasi dari berbagai kesimpulan tersebut

6. Lokasi Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan

- 1) Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- 2) Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

b. Penelitian lapangan

Penelitian lapangan ini melakukan penggalian informasi secara langsung di lapangan guna mendapatkan data dan mencari solusi atas permasalahan yang didapatkan, penelitian lapangan ini dilakukan di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung yang beralamat di Jalan Martanegara No.4, Turangga, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40264